

**IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA  
KETERLAMBATAN DALAM PENYUSUNAN APBD  
(Studi Kasus Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2007-2010)**

TESIS

*Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Guna Mencapai Gelar Magister*

**PROGRAM STUDI  
MAGISTER AKUNTANSI**



Diajukan Oleh:

**NORSAIN**  
**096 202 0020**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"  
JAWA TIMUR  
SURABAYA  
2010**

**IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA  
KETERLAMBATAN DALAM PENYUSUNAN APBD  
(Studi Kasus Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2007-2010)**

Yang disusun oleh:

**NORSAIN**  
**NPM : 0962020020**

Telah dipertahankan di depan Dosen Penguji  
Pada tanggal 31 Desember 2010  
Dan telah memenuhi syarat untuk diterima

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

Pembimbing Utama

Anggota Dewan Penguji

**Dr. Sri Trisnaningsih, Msi**

**Prof. Dr. H. Soeparlan P, SE.Ak.MM**

Pembimbing Pendamping

Dr. Indrawati Yuhertiana, MM.Ak

**Drs. Bambang Suhardito, M.Si,Ak**

**Drs. Ec. Munari, MM**

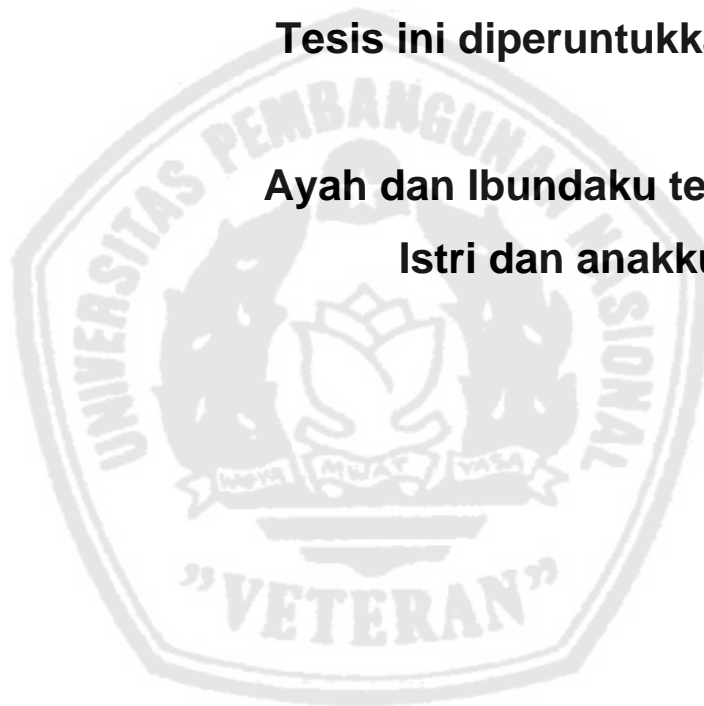
Surabaya, 31 Desember 2010  
UPN Veteran "Jawa Timur"  
Program Pasca Sarjana  
Direktur

**Prof. Dr. H. Djohan Mashudi, SE, MS**

**Tesis ini diperuntukkan kepada :**

**Ayah dan Ibundaku tercinta serta**

**Istri dan anakku tersayang**



## **PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS**

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang sepengetahuan saya, di dalam Naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Tesis ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Magister) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Surabaya, 31. Desember 2010

NORSAIN

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan rahmatNya peneliti dapat menyelesaikan Tesis dengan berjudul **"Identifikasi Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Keterlambatan Dalam Penyusunan APBD Studi Kasus Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2007-2010"**.

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Dr. Sri Trisnaningsih, MSi selaku Pembimbing Utama, dan Drs. Bambang Suhardito, MS,Ak selaku Pembimbing Pendamping. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada :

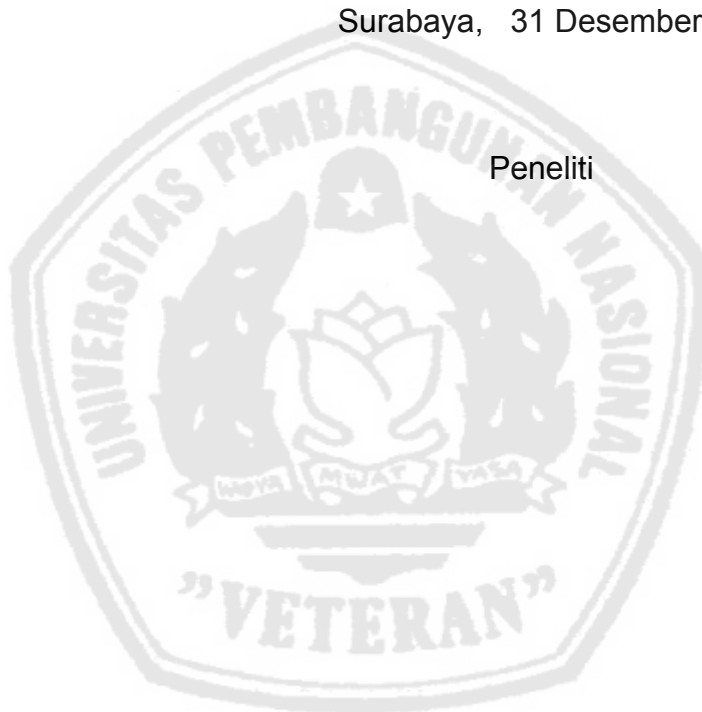
1. Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya yang telah memberi kesempatan bagi penulis belajar mengembangkan pola pikir untuk pengembangan diri.
2. Direktur beserta staf, dan seluruh Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya.
3. Ibu Dr. Indrawati Yuhertiana, MM, Ak selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya.
4. Ibu Dr. Ir. Ida Ekawati MP, Rektor Universitas Wiraraja Sumenep yang memotivasi saya untuk penyelesaiana tesis ini.

5. Bapak Ir. RP. Muchtar M.Ak, selaku sahabat karib dan Pembantu Rektor I Universitas Wiraraja Sumenep yang banyak membantu memudahkan penyelesaian tesis ini.
6. Bapak Benny Doddy Susanto, SE M.Ak, selaku sahabat saudara dan sekaligus Supervisor CSO Bank BNI '46 Sumenep yang banyak membantu dan mendukung secara financial terselesainya tesis ini.
7. Bapak Syahril, SE; As'adil Anwar, SE; Drs. Iskandar M.Ak; Hairil Iskandar, SE; dan Kadarisman, SE M.Ak; selaku sahabat yang memotivasi dan membantu selesainya penulisan tesis ini.
8. Ibu Elly, SE yang memotivasi dan membantu selesainya penulisan tesis ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Pasca Sarjana dan semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dalam penulisan tesis ini.
10. Sembah sujud penulis haturkan kepada Bapak Niswan (alm), dan Ibunda Mariya yang telah banyak membantu dan mendo'akan untuk keberhasilan penulisan tesis ini.
11. Secara Khusus sampaikan kepada istri peneliti Nurjannah, ananda tercinta Amalia Dina Royhana, dan Iqbal Baiti Zein Putera tersayang yang telah memberikan dorongan semangat selama menyelesaikan studi.

Tesis ini masih jauh dari sempurna karena terbatasnya kemampuan dan pengalaman peneliti. Namun demikian peneliti berharap semoga dapat memberikan manfaat dalam membangun keilmuan, masyarakat, bangsa dan Negara.

Surabaya, 31 Desember 2010

Peneliti



# **IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KETERLAMBATAN DALAM PENYUSUNAN APBD (Studi Kasus Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2007-2010)**

## **ABSTRAKI**

Keterlambatan penyusunan APBD menjadi fenomena dalam penganggaran pemerintah daerah di Indonesia. Fenomena ini dialami oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia. Jadwal penyusunan APBD yang dinyatakan oleh peraturan belum belum diterapkan oleh pemerintah daerah. Fenomena ini menyebabkan kelambatan dalam pertumbuhan ekonomi regional.

Berdasarkan kenyataan tersebut, perlu untuk memecahkan masalah ini. Langkah pertama adalah mengidentifikasi faktor penyebab keterlambatan penyusunan APBD. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor penyebab fenomena tersebut dengan menggunakan Pemerintah Daerah kabupaten Sumenep sebagai contoh. Proses untuk mengidentifikasi faktor-faktor tersebut adalah Exploratory Factor Analysis (EFA).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada lima faktor penyebab keterlambatan penyusunan APBD. Faktor tersebut adalah (1) faktor pemahaman hukum dan peraturan perundang-undangan, (2) faktor indikator kinerja, (3) faktor hubungan eksekutif dan legislatif , dan (4) faktor komitmen.

*Keywords: Keterlambatan dalam penyusunan APBD, faktor analisis, pemahaman peraturan perundang-undangan, indikator kinerja, hubungan eksekutif dan legislatif , dan komitmen.*



## SUMMARY

**NORSAIN.** University Graduate School of National Development "East Java", December 2010. Identification of the factors causing delays in the preparation of budget , Main Advisor: Dr. Sri Trisnaningsih, M.Si, counselor: Drs. Bambang Suhardito, MS,Ak.

## SUMMARY

Lateness of APBD preparation becomes a phenomenon in local government budgeting in Indonesia. The phenomenon is experienced by many local governments in Indonesia. Schedule of APBD preparation which is stated by regulations has not been applied yet by local governments. This phenomenon leads to retardation in regional economic growth.

Based on the fact, it is need to solve this problem. The first step is to identify factors causing lateness of APBD preparation . The purpose of this research is to identify factors causing the phenomenon by using Local Government of Rejang Lebong as a sample. Process to identify these factors is Exploratory Factor Analysis (EFA).

The result of this research showed that there are five factors causing lateness of APBD preparation. Those factors are (1) understanding of laws and regulations factor, (2) performance indicator factor, (3) executive and legislative relationship factor, and (4) commitment factor.

*Keywords: Lateness of APBD preparation, factor analysis, understanding of laws and regulations, performance indicator, executive and legislative relationship, and commitment.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Reformasi yang terjadi di Indonesia telah bergulir selama lebih dari satu dasawarsa dan hal itu menandakan pula bahwa pelaksanaan otonomi dalam penyelenggaraan pemerintah juga telah lama dilakukan. Adanya otonomi menjadi salah satu bentuk perubahan dari adanya reformasi dalam bidang pemerintahan. Otonomi adalah bentuk dari hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah daerah untuk mengurus urusan terkait pemerintahan dan kepentingan masyarakat secara otonom sesuai dengan peraturan. Pengertian tersebut dinyatakan dalam UU 32/2004 dan memperlihatkan bahwa keterlibatan pemerintah daerah dalam menjalankan urusan daerah semakin besar bila dibandingkan di masa sebelum otonomi. Konsep otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan berpengaruh pula dalam penyelenggaraan anggaran daerah, pada saat ini, anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam APBD disusun secara mandiri oleh pemerintah daerah untuk menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintah di wilayahnya masing-masing.

Penetapan suatu anggaran dapat dipandang sebagai suatu kontrak kinerja antara legislatif dan eksekutif (Abdullah & Asmara, 2006; Freeman & Shoulders, 2003:94), bagi Rubin (2000:4) penganggaran publik adalah pencerminan dari kekuatan relatif dari berbagai *budget actors* yang memiliki kepentingan atau preferensi berbeda terhadap *outcomes* anggaran. Adanya keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah menjadi alasan mengapa penganggaran menjadi mekanisme terpenting untuk pengalokasian sumberdaya.

Menurut Mardiasmo (2009:62), penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi, dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik.

Proses paling genting dalam konteks politik yang berhubungan dengan produk politik adalah upaya untuk membuat keputusan guna menyelesaikan suatu fenomena atau gejala sosial ekonomi yang muncul. Pengambilan keputusan tentu saja berproses panjang. Proses inipun, pengambilan keputusan menyertakan mekanisme lobi, negosiasi, adu-argumen, hingga konflik yang

berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang harus diakomodasi dalam produk politik yang dihasilkan. Secara hati-hati Anderson, J.E. (1984:13-15) mengutarakan pendapatnya bahwa terdapat lima kategori yang dapat dijadikan kriteria dalam menunjukkan faktor-faktor yang melatar belakangi aktor dalam membuat atau mengambil keputusan. Pertama, *Political Values*, yaitu nilai-nilai atau standar-standar politik. Pembuat keputusan dapat mengevaluasi alternatif kebijakan untuk kepentingan partai politiknya atau kelompoknya, maka hal ini menggambarkan bagaimana nilai-nilai politis dapat merangsek masuk dalam setiap pengambilan keputusan, dalam konteks ini keputusan diambil berdasarkan pada kalkulasi keuntungan politik di mana kebijakan dipandang sebagai alat yang menguntungkan atau alat untuk mencapai tujuan partai politik atau kelompok kepentingannya. Kedua, *Organization Values* yaitu nilai-nilai atau standar-standar organisasional, hal yang paling menonjol adalah, misalnya, bagaimana organisasi yang berorientasi konservatif berhadapan dengan organisasi yang berpandangan revolusioner akan menghasilkan argumentasi-argumentasinya yang berbeda dalam penetapan keputusan.

Pembuat keputusan, birokrat atau politisi, dapat juga dipengaruhi oleh nilai organisasional. Keputusan individu diarahkan melalui pertimbangan seperti keinginan untuk melihat organisasinya

tetap hidup, untuk meningkatkan atau memperluas program dan aktivitasnya, atau untuk menjaga kekuasaan serta hak-hak istimewanya. Ketiga, *personal values*, atau nilai-nilai personal (individu). Konteks ini maka *personal values* menjadi logika berpikir yang perlu juga diperhatikan dalam memahami penetapan atau pengambilan keputusan. Keempat, *policy values* adalah nilai-nilai atau standar-standar kebijakan yang berwarna kepentingan publik. Pembuat keputusan dapat bertindak dengan baik berdasarkan persepsi mereka mengenai kepentingan publik atau kepercayaan pada kebijakan publik yang secara moral benar atau pantas. Kelima, *ideological values*, yaitu nilai-nilai atau standar-standar ideologis. Ideologi adalah sekumpulan kepercayaan dan nilai yang berhubungan secara logis yang memberikan gambaran sederhana mengenai dunia dan cara bertindak sebagai petunjuk bagi seseorang untuk berperilaku.

Penganggaran dapat dilihat sebagai transaksi berupa kontrak mandat yang diberikan kepada agen (eksekutif) dalam kerangka struktur institusional dengan berbagai tingkatan yang berbeda. Sesuai dengan apa yang dinyatakan pada teori keagenan, bahwa pihak *principal* dan *agen* memiliki kepentingan masing-masing, sehingga benturan atas kepentingan ini memiliki potensi terjadi setiap saat.

Pihak agen berkemampuan untuk lebih menonjolkan kepentingannya karena memiliki informasi yang lebih dibandingkan pihak *principal*, hal ini disebabkan karena pihak agenlah yang memegang kendali operasional di lapangan, sehingga pihak agen lebih memilih alternatif yang menguntungkannya, dengan mengelabui dan membebankan kerugian pada pihak *principal* (Fozard, A. 2001:39-40).

Penelitian yang dilakukan oleh Manor & Crook (1998) dalam Prasojo, E. (2009:186) menyatakan bahwa dalam banyak hal, pemilihan langsung kepala daerah dan pemisahan yang tegas antara *mayor* (kepala daerah) dan *councilor* (anggota DPRD) di negara-negara berkembang telah menyebabkan praktek-praktek pemerintahan yang semakin buruk. Faktor utamanya adalah karakteristik elite lokal yang kooptatif dan selalu menutup kesempatan pihak lain untuk berkompetisi dalam politik, pengetahuan dan kesadaran politik rakyat yang rendah, serta tidak adanya pengawasan yang terus-menerus dari DPRD terhadap kepala daerah, selanjutnya dipertegas oleh Prasojo, E (2009) bahwa faktor-faktor tersebut juga terrefleksikan di beberapa daerah di Indonesia. Kooptasi kekuasaan dilakukan oleh calon *incumbent* dengan memanfaatkan akses birokrasi yang dimilikinya.

Menurut UU 33/2004 tentang perimbangan keuangan antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, APBD adalah rencana keuangan yang dibuat pemerintah daerah secara tahunan melalui pembahasan dan persetujuan antara DPRD dan pemerintah daerah dan kemudian disahkan dalam peraturan daerah.

Penyusunan APBD oleh setiap daerah di Indonesia menjadi wujud penyelenggaraan otonomi yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah melalui penyusunan anggaran. APBD setiap tahunnya disusun oleh pemerintah daerah dan untuk mendukung penyusunan APBD pemerintah pusat menerbitkan peraturan yang menjadi landasan dalam menyusun APBD. Salah satunya aturan yang diterbitkan tersebut adalah Permendagri 13/2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, berdasarkan aturan tersebut telah diuraikan jadwal dalam menyusun APBD yang berlaku bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

Adanya aturan yang berisikan jadwal tersebut belumlah mampu untuk mengatasi fenomena yang tengah terjadi dalam penyusunan APBD di Indonesia. Fenomena tersebut turut menggelitik perhatian karena fenomena ini terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia. Fenomena tersebut adalah terjadinya keterlambatan dalam penyusunan APBD. Keterlambatan dalam penyusunan APBD ini telah terjadi dalam kurun waktu yang

lama, bahkan di masa reformasi banyak pemerintah daerah yang masih terlambat dalam menyusun APBD. APBD yang mengalami keterlambatan dalam penyusunan tersebut merupakan APBD yang terlambat ditetapkan atau disahkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD sebelum atau saat 31 Desember.

Menurut (KPK,2008) diketahui bahwa pada tahun 2005 dari 33 provinsi di Indonesia sebagian besar provinsi terlambat dalam mengesahkan APBD, yakni sebanyak 28 provinsi, lalu sisanya sebanyak 5 provinsi mengesahkan APBD sesuai jadwal, yaitu tidak melebihi 31 Desember. Selain itu, diketahui pula keterlambatan dalam penyusunan APBD juga terjadi di tahun 2009.

Berdasarkan data yang diperoleh dari (Seknas Fitra, 2010) dalam salah satu *website* diketahui bahwa penetapan perda APBD untuk tahun 2009 sebanyak 68,24% atau 348 daerah ditetapkan dalam kurun waktu 1 Januari – 31 Maret. Posisi kedua sebanyak 23,14% atau 118 daerah telah menetapkan APBD sesuai jadwal dan 44 daerah atau 8,63% menetapkan APBD melebihi 31 Maret. Informasi yang tersaji tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar daerah di Indonesia mengalami keterlambatan dalam penyusunan APBD dengan ditandai terlambatnya penetapan perda APBD.



Keterlambatan penyusunan APBD telah melanda sebagian besar wilayah di Indonesia dan hal itu telah berlangsung pada kurun waktu yang lama bahkan hingga saat ini. Kabupaten Sumenep merupakan salah satu daerah yang tergolong mengalami keterlambatan dalam menyusun APBD khususnya APBD untuk tahun 2007-2010. APBD pada keempat tahun anggaran tersebut disahkan pada kurun waktu antara 1 Januari – 31 April.

Selain banyaknya daerah yang mengalami keterlambatan dalam penetapan APBD, adanya keterlambatan APBD dapat memberikan dampak negatif. Dampak yang ditimbulkan dari keterlambatan dalam penyusunan APBD adalah terlambatnya pelaksanaan program pemerintah daerah yang umumnya sebagian besar pendanaan program tersebut berasal dari APBD. Program yang terlambat dilaksanakan dapat berpengaruh pada pelayanan publik terhadap masyarakat.

Data berikut ini menunjukkan keterlambatan penetapan anggaran di kabupaten Sumenep:

NO	APBD	Penetapan	Penetapan Sebelum/saat	Keterlambatan
1	2007	3 April 2007	31 Desember 2006	3 bulan lebih
2	2008	7 April 2008	31 Desember 2007	3 bulan lebih
3	2009	20 April 2009	31 Desember 2008	3 bulan lebih
4	2010	22 Jan 2010	31 Desember 2009	22 hari

Sumber data: Sekretaris Dewan Kabupaten Sumenep

Ada banyak alasan yang disebut sebagai biang keladi keterlambatan tersebut. Mulai dari kepentingan politik yang mencuat di lembaga legislatif, ketidakmampuan aparatur daerah menyusun rancangan APBD yang memadai, dan lambatnya penetapan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) baru, seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah (PP) 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, serta alasan lain yang buat orang awam susah dipahami.

Semua alasan yang mengemuka itu, bisa dikategorikan menjadi dua penyebab keterlambatan penyelesaian APBD , yakni persoalan teknis yang meliputi penyiapan rancangan dan pemenuhan standarnya, serta persoalan moral yang mencakup kedisiplinan lembaga legislatif yang lebih mengedepankan kepentingan partai, kelompok, atau golongan ketimbang mengutamakan kepentingan masyarakat di daerahnya. Persoalan pertama yang menyangkut teknis, seperti kemampuan eksekutif dalam menyiapkan rancangan, memang cukup serius. Ganjalan kedua yang menghambat penyelesaian APBD adalah persoalan moral, baik di kalangan eksekutif maupun legislatif.

Para legislator dan eksekutif sepertinya tidak punya tanggung jawab moral untuk menyelesaikan APBD tepat sesuai dengan jadwal.

Dua pilar penting yakni eksekutif dan legislatif itu tampak tak punya greget untuk segera menyelesaikan tanggung jawab mengegolkan anggaran daerah. Keduanya lebih banyak melontarkan wacana ke publik yang tidak ada relevansinya dengan penyelesaian anggaran menjadi sebuah peraturan daerah (perda). Patut dipertanyakan, kalau penetapan anggaran daerah yang merupakan kegiatan rutin saja tidak bisa diselesaikan tepat waktu, bagaimana nasib penyelesaian kebijakan lainnya?

APBD yang terlambat dalam proses penyusunannya dapat pula berpengaruh terhadap perekonomian daerah, hal tersebut terjadi karena ketika APBD terlambat ditetapkan melebihi 31 Desember, maka di masa APBD belum disahkan maka aliran dana dari sektor pemerintah akan terhambat dan itu memberikan pengaruh pada aliran uang atau transaksi di daerah dan pada akhirnya perekonomian daerah turut merasakan dampak dengan adanya kelesuan ekonomi.

APBD yang terlambat disahkan oleh pemerintah daerah dan DPRD dapat pula memberi peluang munculnya korupsi, sebagaimana dinyatakan (KPK,2008). Peluang korupsi tersebut dapat muncul dikarenakan adanya usaha untuk mengalihkan dana yang tersisa dari pelaksanaan program APBD ke dalam rekening pribadi. Dana yang tersisa berasal dari dana sisa anggaran program

yang tidak selesai dilakukan karena terlambat dalam pelaksanaan proses awal. Pengalihan dana ke rekening pribadi tersebut membuka peluang terjadi penyelewengan dana APBD untuk kepentingan pribadi sehingga terjadilah korupsi. Pada akhirnya dampak yang muncul dari keterlambatan penyusunan APBD tersebut merugikan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa hal-hal yang menjadi motivasi dalam penelitian ini adalah pertama, masih sedikit adanya penelitian yang terkait dengan keterlambatan dalam penyusunan APBD termasuk dalam hal ini di wilayah Sumenep belum dilakukan penelitian tersebut. Kedua, keterlambatan dalam penyusunan APBD telah menjadi salah satu fenomena yang terjadi di sebagian besar wilayah pemerintah daerah Indonesia dan hingga saat ini fenomena tersebut terus terjadi setiap tahunnya. Ketiga, dampak yang timbulkan dari adanya keterlambatan APBD dapat pada akhirnya merugikan masyarakat selaku penerima layanan publik dan hal ini bertentangan dengan tujuan pemerintah yang selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah adalah “Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab

terjadinya keterlambatan dalam penyusunan APBD?”

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya keterlambatan dalam penyusunan APBD, khususnya di Kabupaten Sumenep.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Untuk Kepentingan Ilmiah
  - a. Dalam dunia akademis dan praktis, bagi peneliti, menambah khasanah ilmu pengetahuan.
  - b. Bagi para akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi sektor publik (ASP) terutama pengembangan sistem pengendalian manajemen disektor publik.
  - c. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan oleh pembaca atau peneliti lain sebagai referensi atau dasar untuk penelitian lanjutan.
2. Untuk kepentingan praktis

Setelah diidentifikasi faktor-faktor penyebab tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi penyelesaian sekaligus pencegahan terjadinya keterlambatan penyusunan APBD.